

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Agraris dimana sebagian besar penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Hal ini berarti sumber ekonomi dan sosial penduduk sangat tergantung pada tata produksi dan hasil-hasil pertanian. Dengan demikian persoalan pertanian sesungguhnya merupakan masalah pokok bagi masyarakat Indonesia. Masalah pertanian merupakan indikator penting untuk mengukur tingkat kesejahteraan kehidupan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.¹

Sampai saat ini sektor pertanian masih memegang peranan cukup penting dalam struktur perekonomian Bali. Pada tahun 2006 sektor pertanian menyerap 35-45% dari seluruh tenaga kerja di Bali dan memberikan sumbangan sebesar 19,96% terhadap pembentukan PDRB. Dari besaran PDRB tersebut sub sektor perkebunan memberi kontribusi sebesar 1,74% yang sebagian besar berasal dari pengembangan komoditi andalan dan unggulan. Oleh karena itu, peran sub sektor perkebunan terhadap perekonomian Bali sangat ditentukan oleh keberhasilan pengembangan komoditi andalan dan unggulan perkebunan.

Capaian produktivitas kebun dan kualitas produksi untuk masing-masing komoditi rata-rata masih di bawah kapasitas teknis yaitu 517 kg/ha dari 560 kg/ha.²

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Bangli menyebutkan bahwa pembangunan bidang ekonomi diprioritaskan pada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas. Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas meliputi pembangunan beberapa subsektor yaitu subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Penetapan ini membawa dan menjadikan konsekwensi bahwa subsektor perkebunan ikut bertanggung jawab dalam pergerakan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

¹ RPJMP Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perhutanan Kabupaten Bangli Tahun 2008-2014

² *Road Map* Pengembangan komoditi perkebunan Dinas Perkebunan Prop. Bali Tahun 2007

Usaha perkebunan sangat berkaitan langsung dengan aspek ekonomi, sosial dan ekologi. Dalam aspek ekonomi peranan sektor ini cukup berarti dalam penerimaan devisa negara, kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga terhadap pendapatan masyarakat. Aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup banyak baik dalam status sebagai petani pemilik maupun petani penggarap. Sedangkan dalam aspek ekologi, dengan sifat tanaman perkebunan sebagai tanaman tahunan yang berbentuk pohon sangat mendukung kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup karena dapat berperan sebagai tanaman penutup tanah sehingga dapat menjaga siklus hidrologis dan pelestarian sumber daya air yang menjadi sumber kehidupan manusia dan mengurangi degradasi lahan.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah dimensi rasional dari pembangunan sekarang sudah banyak diterima, namun dalam mewujudkannya masih diperlukan suatu upaya mengingat banyak kendala terhadap pemahaman pemberdayaan masyarakat sebagai suatu paradigma baru pembangunan.³

Pemerintah Kabupaten Bangli dalam pemberdayaan masyarakat telah melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan petani dalam wujud Bantuan Penguatan Modal Kelompok berupa: (a) Bantuan dana sebagai modal kerja, (b) Bantuan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan keterampilan masyarakat, (c) Pengembangan kelembagaan masyarakat termasuk kelembagaan kelompok Tani.

Upaya menanggulangi pengangguran yang diakibatkan oleh dampak krisis ekonomi pemerintah daerah melaksanakan program jaring pengaman sosial yang diprioritaskan pada Pelatihan

³ Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat (Ginanjari K, 1996: 145)

Keterampilan sebagai penciptaan Lapangan Kerja Produktif, Pengembangan Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Sekolah Lapang Pembrantasan Hama Terpadu (SLPHT).

Disamping kegiatan tersebut pemerintah juga melaksanakan program pelestarian lingkungan hidup berupa "Gerakan Rehabilitasi Lahan dan Air" (GERHAN) seperti: (a) Penanaman sejuta pohon, (b) Bantuan bibit kehutanan, pertanian dan perkebunan dan Pembinaan petani di kawasan hutan.

Menangani pemberdayaan masyarakat di pedesaan harus dilakukan pada akar permasalahan, dimana masyarakat secara partisipatif diberikan peluang untuk menentukan pilihan usahanya sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga masyarakat tidak menjadi obyek pembangunan tapi menjadi subyek pembangunan. Hal itu disebabkan karena syarat utama keberlanjutan adalah pembangunan kapasitas lokal dan kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.⁴

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pada semangat Otonomi Daerah dan pelaksanaan asas desentralisasi, memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan daerahnya masing-masing termasuk dalam penanggulangan kemiskinan, potensi sumber daya alam yang dimiliki harus dimanfaatkan secara profesional sehingga bisa bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat dan harus tetap menjaga kesinambungan alam dengan pelestarian lingkungan.

⁴*Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Aditya Media, Yogyakarta (Sunartiningsih, A. 2004)⁴

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penulisan penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah kontribusi kopi arabika terhadap peningkatan pendapatan masyarakat/petani di Desa Belantih?
2. Bagaimanakah peran masyarakat dalam melestarikan lingkungan?
3. Bagaimanakah peran Pemerintah dalam kebijakan pengembangan agribisnis berbasis kopi arabika?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui kontribusi kopi arabika terhadap peningkatan pendapatan masyarakat/petani di Desa Belantih.
2. Untuk mengetahui peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
3. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam kebijakan pengembangan agribisnis berbasis kopi arabika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian untuk memperkaya wacana teori Kopi Arabika di Masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian sebagai bahan bandingan atau pedoman bagi Petani Kopi Arabika.

BAB. II

LANDASAN TEORITIK

A. Pola Pemberdayaan masyarakat

Pola pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan kemampuan sendiri sehingga bebas dan mampu mengatasi masalah dan mengambil keputusan secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk mendorong terciptanya kemampuan masyarakat untuk secara mandiri, serta mampu mengatasi persoalan di masa yang akan datang. Pemberdayaan masyarakat dengan demikian tidaklah dapat dicapai dalam waktu sekejap, tetapi pemberdayaan itu memerlukan proses. Proses yang dimaksudkan adalah dengan memberikan kewenangan (*authority*), aksesibilitas terhadap sumber daya dan lingkungan yang akomodatif.

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah dimensi rasional dari pembangunan sekarang sudah banyak diterima, namun dalam mewujudkannya masih diperlukan suatu upaya mengingat banyak kendala terhadap pemahaman pemberdayaan masyarakat. Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalan yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat.⁵

Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendinamisasikan potensinya, dengan kata lain memberdayakannya. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini dipandang lebih luas hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*)

Keberdayaan dalam konteks masyarakat adalah kemampuan individu yang bersenyawa dalam masyarakat dan membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Keberdayaan dalam

⁵ Dasar pandangan strategi pemberdayaan masyarakat adalah bahwa upaya yang dilakukan harus diarahkan langsung pada akar persoalannya yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat (Ginanjar K, 1996: 145)

konteks ini kemudian berkaitan erat dengan kondisi fisik dan mental seseorang. Namun selain nilai fisik ada pula nilai-nilai intristik dalam masyarakat yang juga sumber keberdayaan seperti kekeluargaan, gotong royong dan bagi Indonesia Kebinekaan.

B. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah daerah dan/atau kelompok berbasis komunitas mengelola sumber daya yang ada dan masuk kepada penataan kemitraan baru dengan sektor swasta, atau diantara mereka sendiri, untuk menciptakan pekerjaan baru dan merangsang kegiatan ekonomi wilayah

Local Economic Development is the process by which actors within cities and towns- "our communities"- work collectively with public, business and non governmental sector partners to create better conditions for economic growth and employment generation. Through this process they establish and maintain a dynamic entrepreneurial culture and create new community and business wealth in order to enhance the quality of life for all in the community.

Mengembangkan ekonomi lokal berarti bekerja secara langsung membangun *economic competitiveness* (daya-saing ekonomi) suatu daerah untuk meningkatkan ekonominya. Prioritas ekonomi lokal pada peningkatan daya saing ini sangat krusial, mengingat kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah komunitas ditentukan oleh kemampuannya beradaptasi terhadap perubahan yang cepat dan meningkatnya kompetisi pasar.

Setiap komunitas mempunyai kondisi potensi lokal yang unik yang dapat membantu atau menghambat pengembangan ekonominya. Atribut-atribut lokal ini akan membentuk benih, yang dari strategi pengembangan ekonomi lokal dapat tumbuh memperbaiki daya saing lokal. Membangun

daya saing tiap komunitas perlu memahami dan bertindak atas dasar kekuatan kelemahan, peluang dan ancaman untuk membuat daerah menarik bagi kegiatan bisnis, kehadiran pekerja dan lembaga yang menunjang.

Daya saing dapat diukur dengan beberapa katagori indikator, tiap ukuran mencerminkan insentif penting untuk berinvestasi di daerah tersebut. Setidaknya ada empat yang digunakan untuk mengukur daya saing:

- Struktur ekonomi : komposisi ekonomi, produktivitas, output dan nilai tambah, serta tingkat investasi asing atau domestik.
- Potensi wilayah : yang *non-tradeable* seperti lokasi, prasarana, sumber daya alam, *amenity*, biaya hidup dan bisnis dan citra daerah.
- Sumber daya manusia : kualitas SDM yang mendukung kegiatan ekonomi.
- Kelembagaan : konsistensi kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat, serta budaya yang mendukung produktivitas.

Ciri utama pengembangan ekonomi lokal terletak pada titik sentralnya yang mengarah pada kebijakan ” *endogeneous development*” menggunakan potensi sumber daya manusia, institusional dan fisik setempat.⁶

Bagaimanapun bentuk kebijakan yang ditempuh, pengembangan ekonomi lokal mempunyai satu orientasi, yaitu meningkatkan jumlah dan variasi peluang kerja yang tersedia untuk penduduk lokal. Dalam mencapai hal tersebut, pemerintah daerah dan kelompok masyarakat dituntut untuk mengambil inisiatif dan bukan hanya berperan pasif saja. Setiap kebijakan dan keputusan publik dan sektor usaha, serta keputusan dan tindakan masyarakat, harus sesuai dengan orientasi pengembangan

⁶*Planning Local Economic Development: Theory and Practice dalam www.satunet.com* (Blakely, Edward J.1994).⁶

otonomi lokal atau sinkronisasi dan mendukung kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang telah disepakati bersama.

C. Pemberdayaan Modal Sosial

Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan koperasi) untuk kepentingan bersama. Pierre Bourdieu.(1970) berpendapat bahwa modal sosial mengacu pada keuntungan dan kesempatan yang didapatkan seseorang di dalam masyarakat melalui keanggotaannya dalam entitas sosial tertentu (paguyuban, kelompok arisan, asosiasi tertentu seperti jama'ah, pengajian, majelis ta'lim

Menurut James Coleman dalam Ahmad menyatakan bahwa modal sosial adalah sumber daya yang lahir dari perkumpulan suatu ikatan sosial tertentu. Selanjutnya dikatakan bahwa berbeda dengan aset finansial yang dapat diperoleh dari kredit bank, aset sumber daya manusia yang dapat diperoleh intelektualitasnya maka modal sosial dapat diperoleh dari relasi antar manusia⁷

Modal sosial dinamakan sebagai paduan kepercayaan, norma-norma dan jaringan kerja yang dapat dipergunakan oleh masyarakat untuk mengatasi masalah bersama (*stocks of social trust, norms and networks that people can draw upon in order to solve common problems*).

Terdapat tiga macam modal, yaitu modal fisik, modal manusia (SDM) dan modal sosial. Secara sederhana kita dapat membedakannya bahwa modal fisik bersifat nyata (*tangible*), dapat dihitung dan dapat diperhitungkan, ukuran penilaian jelas, misalnya: lautan,pulau, tambang; sementara modal manusia bersifat *less tangible* tapi masih bias kiukur, skill individual, kemampuan,

⁷ Modal sosial ini juga melahirkan ” kontrak sosial” dan norma yang berlaku bagi seluruh masyarakat (Ahmad, 2001)⁷

pengetahuan, diukur dari tingkat pendidikan dan keterampilan. Sedangkan modal sosial bersifat *less tangible*, relasi sosial, terkait dengan orang lain, tidak terukur, misalnya: *trust* (kepercayaan).

Pelaksanaan pembangunan setidaknya akan melibatkan tiga *stake holders* yaitu pemerintah, masyarakat dan swasta. Proporsi peran masing-masing *stake holders* tersebut akan sangat ditentukan oleh paradigma pembangunan yang digunakan. Dalam paradigma pembangunan lama, tampak peranan negara jauh lebih menonjol dibandingkan swasta, apalagi masyarakat. Beberapa manifestasinya kelihatan dalam strategi dan pendekatan pembangunan yang bersifat sentralistis dan *top-down*. Sebagai implikasi lebih lanjut adalah sangat dominannya pendekatan yang mementingkan keseragaman atau pendekatan *uniformitas* yang sering disebut juga *blue-print approach*. Dalam banyak hal program-program pembangunan dirancang dari atas, masyarakat cenderung hanya berperan dalam pelaksanaannya, tidak dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Instrumen pembangunan yang dibangun biasanya dibuat secara seragam untuk mendukung program itu. Kenyataan yang seringkali terjadi instrumen ini justru mematikan atau paling tidak mengabaikan peranan institusi lokal yang sebetulnya merupakan sebagian dari energi sosial.

Kenyataan tersebut justru akan memperberat beban pemerintah, karena potensi kapasitas lokal tidak dapat teraktualisasi dan keberlanjutan pembangunan tidak terjadi.

D. Pengembangan Tanaman Kopi Arabika

Faktor Lahan mempunyai andil yang cukup besar dalam mendukung tingkat produktifitas kopi. Agar diperoleh pertumbuhan dan produktifitas yang baik, tanaman kopi memerlukan persyaratan tumbuh seperti:

1. Tanah

Kopi arabika dapat tumbuh baik pada kemiringan kurang dari 30% dengan kedalaman tanah efektif lebih dari 100 cm. Tanaman kopi dapat tumbuh pada PH 5,5-6,5, tekstur tanah berlempung (*loamy*) dengan struktur lapisan atas tanah remah.

2. Iklim

Suhu optimum 15-24 derajat, ketinggian 1000-2000 m dpl dengan bulan kering (curah hujan < 60 mm/bulan), 1-3 bulan dan curah hujan 1250-2500 mm/tahun.

Kopi Arabika sebagai komoditi unggulan karena dari segi luas tanam komoditi ini terluas diusahakan di Kabupaten Bangli (Tabel 1), dari sisi produksi komoditi ini memberikan kontribusi antara 42-50 % terhadap total produksi Tingkat Provinsi Bali dari serapan tenaga kerja dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya banyak menyerap tenaga kerja sehingga dapat menanggulangi pengangguran.

Demikian juga dari segi produktivitas, rata-rata produksi kopi Arabika di Kabupaten Bangli lebih tinggi dibandingkan rata-rata produksi tingkat Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Perkembangan Luas Areal Tanam Kopi Arabika di Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli, Tahun 2004-2008

No	Tahun	Luas Areal (Ha)		
		Provinsi Bali	Kabupaten Bangli	Persentase (%)
1	2004	9.671	4.155	42,96
2	2005	7.543	3.739	49,57
3	2006	7.498	3.753	50,05
4	2007	7.874	3.925	49,84
5	2008	8.198	3.920	47,81

Sumber : Statistik Perkebunan Bali, 2008

Berdasarkan luas areal budidaya kopi Arabika di Propinsi Bali lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata 48,046%, luas tanaman kopi arabika berada di Kabupaten Bangli. Tabel diatas

memberikan interpretasi atau makna bahwa Kabupaten Bangli secara relatif lebih berpotensi untuk pengembangan kopi arabika di tingkat propinsi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

Demikian juga dari segi produksi, budidaya kopi arabika memberikan hasil paling tinggi dibandingkan dengan tanaman perkebunan lainnya.

Perkembangan Produksi Kopi Arabika di Propinsi Bali dan Kabupaten Bangli Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2. Perkembangan Produksi Kopi Arabika di Provinsi Bali dan Kabupaten Bangli, Tahun 2004-2008.

No	Tahun	Produksi (Ton)		
		Provinsi Bali	Kabupaten Bangli	Persentase (%)
1	2004	3.693	1.726	46,73
2	2005	3.279	1.800	54,88
3	2006	2.879	1.590	59,38
4	2007	3.114	1.785,37	57,33
5	2008	2.870	1.785,37	62,208

Sumber : Statistik Perkebunan Bali, Tahun 2008

Sisi produksi, Kabupaten Bangli merupakan Kabupaten Produsen Kopi Arabika ke lima terbesar dibandingkan dengan kabupaten lainnya yang juga menghasilkan komoditi yang sama seperti Tabanan, Gianyar, Karangasem dan Singaraja. Rata-rata kontribusi produksi Kabupaten Bangli terhadap produksi propinsi dalam lima tahun terakhir (tahun 2004-2008) adalah 56,10% dengan kisaran 46,73%- 62,208%. Wilayah Kabupaten Bangli terdiri dari empat Kecamatan, hanya satu wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Susut tidak bisa diusahakan tanaman kopi karena kondisi topografis dan agroklimat yang tidak cocok dan kurang sesuai untuk pertumbuhannya. Sedangkan dari tiga kecamatan lainnya, Kecamatan Kintamani merupakan lokasi dengan areal tanam kopi arabika

terluas. Sebagai misal pada tahun 2008 dari luas areal tanam kopi Arabika di Kabupaten Bangli seluas 3.920 ha, 3.709 ha atau sekitar 94 % diantaranya terdapat di Kecamatan Kintamani, 5 % di Kecamatan Bangli dan hanya sebagian kecil, yakni 1 % ditanam di Kecamatan Tembuku. Lokasi Sentra Produksi, Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Bangli, Tahun 2008 dapat dilihat pada tabel 3. berikut ini:

Tabel 3. Lokasi Sentra Produksi, Luas Areal, Produksi dan Produktivitas Kopi Arabika di Kabupaten Bangli, Tahun 2008

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha/Th)
1	Bangli	205	120,86	669
2	Tembuku	11	3,14	314
3	Kintamani	3.709	1.661,37	568
J u m l a h		3.925	1.785,37	517
TOTAL BALI		8.198	2.870	527
<i>Persentase (%)</i>		<i>47,87</i>	<i>62,208</i>	<i>98,102</i>

Sumber : Statistik Perkebunan Bali, 2008

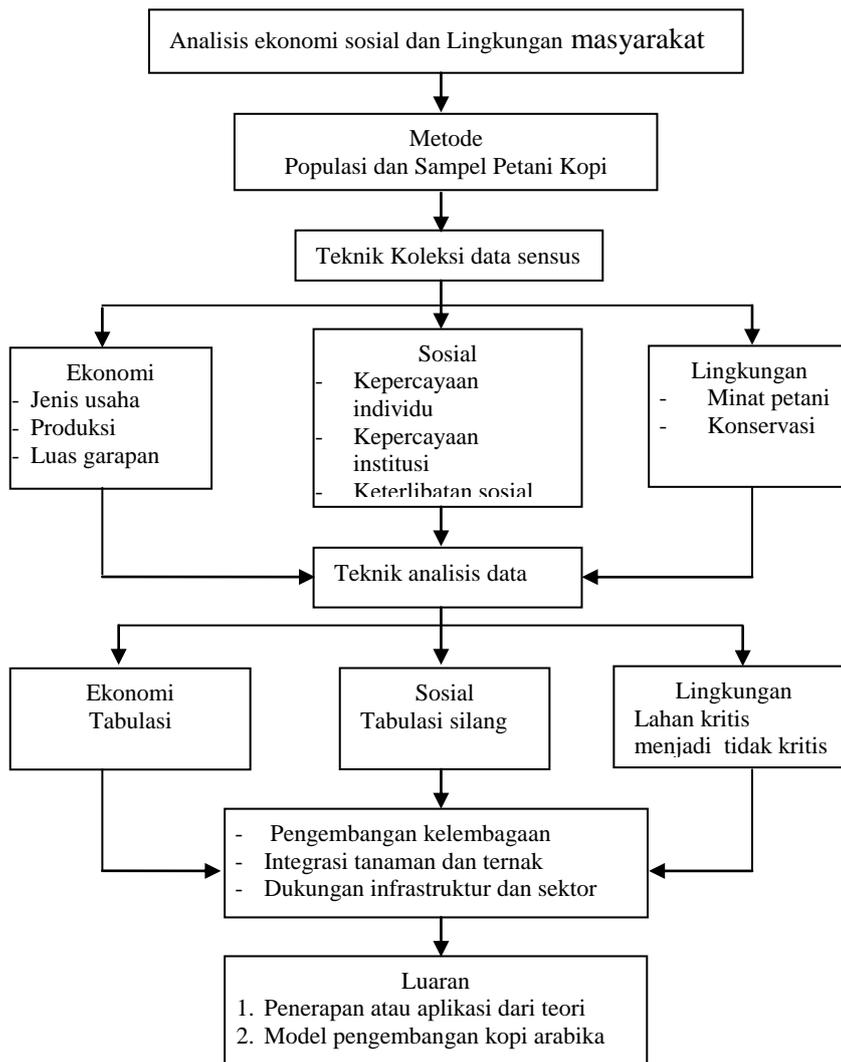
Tabel 3. terlihat bahwa pada tahun 2008, setengah atau 47,87 % luas areal tanam kopi Arabika di Provinsi Bali terdapat di Kabupaten Bangli, dengan kontribusi produksi sebesar 62,208 %. Dari segi produktivitas juga menunjukkan bahwa rata-rata produksi kopi Arabika yang dihasilkan di Kabupaten Bangli masih lebih rendah 517 kg/ha (98,102 %) dari rata-rata produksi Bali yaitu 527 kg/ha. Dari data potensi wilayah dan kondisi agroekosistem yang disajikan ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bangli memang cocok dan masih ada peluang peningkatan produksi dan pengembangan agribisnis kopi Arabika.

E. Kondisi Geografis Desa Belantih.

Desa Belantih yang terletak pada ketinggian 1100-1200 meter dari permukaan laut, luas wilayah 964 Ha dengan curah hujan 2.103,10 mm per tahun serta suhu berkisar antara 24°-28° C dengan kemiringan tanah kurang dari 35%, menjadikan potensi pengembangan tanaman perkebunan sangat prospektif. Potensi pengembangan komoditas perkebunan di Desa Belantih cukup luas yaitu 760 Ha (78,8%) dari luas wilayah, dengan luas areal yang baru tergarap seluas 599,25 atau sekitar (61,16%). Komoditi Perkebunan yang dominan dikembangkan adalah kopi, kakao, panili, cengkeh dan empon-empon. Komoditi unggulan perkebunan yang diusahakan adalah kopi Arabika, sedangkan komoditas lainnya seperti: kakao, cengkeh, tembakau, panili dan empon-empon merupakan komoditas yang banyak dikembangkan sebagai tanaman sela/tumpang sari dengan tanaman pokok.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan membahas sesuai dengan kerangka konseptual dimana pengembangan kopi arabika dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi yang ada yaitu faktor eksternal dan internal dengan dampak yang terjadi yaitu kesejahteraan masyarakat dengan adanya peningkatan pendapatan.



Gambar 1: Tahapan Penelitian Pemberdayaan Masyarakat

BAB. III

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji tentang perilaku birokrasi dalam fungsinya sebagai pemberi pelayanan masyarakat di bidang Pola pengembangan kopi Arabika terhadap masyarakat sebagai institusi lokal yang ada di desa Belantih, ini berarti penelitian ini harus memahami kepentingan subjektif dari perilaku yang dimainkan oleh birokrasi Pemerintah dan masyarakat.